



PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana kerja (renja) ini memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, dana indikatif serta sumbernya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari APBD Kabupaten.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga dalam penyusunan perlu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Kepada semua pihak yang membantu penyelesaian Perubahan Rencana Kerja (renja) ini disampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dalam perencanaan program tahun 2025.

Tideng Pale, 25 September 2025

Kepala BPKAD



Hj. Evihar, S. Sos

Nip. 19740628 200112 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

LEMBAR PENGESAHAN..... iii

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU... 5

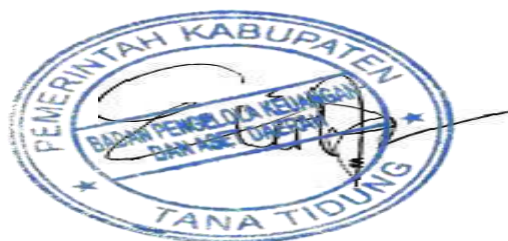
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 47

BAB V PENUTUP 58

**LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025**

**DISAHKAN OLEH
TIDENG PALE, 25 SEPTEMBER 2025
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**Hj. EVIHAR, S. Sos
NIP. 19740628 200112 2 002**



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Gedung Mess Guru SMA/SMP Terpadu Unggulan Tideng Pale

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR :900/20/BPKAD-KTT/IX/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. Sesuai Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tana Tidung Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
7. Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung.
9. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024.
10. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tan Tidung No. B.00.7/136/setda/2025 Tentang Penyampaian Dokumen Rancangan PD Perubahan Tahun 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAN ASET DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

Pasal 1

- 1) Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2025.

Pasal 2

Sistematika Perubahan RENJA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Rencana Kerja Sampai dengan triwulan IV
- Bab III : Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab IV : Penutup

Pasal 3

Perubahan RENJA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Segala yang terjadi pada P e r u b a h a n Renja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada
anggaran pada tahun berkenaan akan disusun
P e r u b a h a n Renja Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal, 25 SEPTEMBER 2025
Kepala BPKAD



Hj. Evihar, S. Sos
Nip. 19740628 200112 2 002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
2. Inspektur Kabupaten Tana Tidung
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Tana Tidung

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-Renja SKPD). Perubahan Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja

Dasar Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penacatatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang–Undang Nomor 34 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2024 Pe tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
20. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Nomor B.00.7/136/setda/2025 tentang Penyampaian Dokumen Perubahan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya P e r u b a h a n Renja SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program
3. Menyelaraskan program dengan penganggaran
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan
5. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD

1.3.2. Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Perubahan Renja SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (Satu) tahun anggaran
2. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025
3. Sebagai upaya mewujudkan efisien dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap

Rancangan Akhir RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

Menguraikan program dan kegiatan serta pendanaan dan sumber anggaran tahun 2025

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis Akrua. Penganggaran berbasis Akrua merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun program kegiatan. Acuan BPKAD Kabupaten Tana Tidung, selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tana Tidung BPKAD memiliki 3 indikator kinerja utama, (IKU) yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUAPTEN TANA TIDUNG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel		Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Tana Tidung	4 (empat) Tingkatan Opini BPK RI atas Pemeriksaan LKPD: 1. Pernyataan Menolak Memberikan Opini 2. Opini Tidak Wajar 3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Hasil Periksa Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan SAP Jumlah Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah..... x 100%	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Pengelolaan Aset yang Akuntabel	Jumlah Data Aset Daerah Yang Terinventarisasi..... x 100% Jumlah Seluruh Aset Daerah	Neraca Aset Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... x 100% Pendapatan Transfer	Laporan Pendapatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Tahun (n) - Jumlah dapatan Tahun (n-1).....x 100% Jumlah Pendapatan Tahun (n-1)	Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja. Capaian kinerja rata-rata yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar 540.73 % dengan kategori sangat berhasil, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023			KETERANGAN
		TARGET	CAPAIAN	%	
Meningkatkan Kualiatas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	85%	100%	117,65%	Sangat Berhasil
	Persentase Pengelolaan Aset yang Akuntabel	85%	100%	117,65%	Sangat Berhasil
Tingkat Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	5%	69,31%	1386,20%	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Indikator				540,73%	Sangat Berhasil

Tiga Indikator termasuk kategori Sangat Berhasil, yakni Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel, Persentase Pengelolaan Aset yang Akuntabel, dan Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2022 maka secara keseluruhan capaian indikator mengalami peningkatan sebesar 452,50 % dan termasuk kategori Sangat Berhasil.

Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2022		2022	2023	SELISIH
		TARGET	CAPAIAN	%	%	
Meningkatkan Kualiatas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	82%	100%	121,95%	118%	-4%
	Persentase Pengelolaan Aset yang Akuntabel	82%	100%	121,95%	118%	-4%

Tingkat Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	5%	1,04%	20,08%	1386,20%	1365%
Rata-rata Capaian Indikator				88,23%	540,73%	452,50%

Analisis atas capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah salah satu indikator kinerja yang disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan SAP berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Penerapan SAP berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansinya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Adapun komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan PP 71 tahun 2010 yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

IK : Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel :

= Laporan Keuangan Pemerintah Dearah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan

SAP / Jumlah Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah x 100%

= 7 Laporan / 7 Laporan x 100%

= 100%

Pembuatan Laporan Keuangan juga dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Sebanyak 34 OPD dari 34 OPD yang ada di Kabupaten Tana Tidung telah memenuhi komponen SAP tersebut, dimana OPD diwajibkan menyusun laporan keuangan yang hanya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh BPKAD melalui kegiatan rekon menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Dengan demikian, penyebutan OPD selaku entitas pelaporan pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa BPKAD telah melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (yang mencakup anggaran dan barang, diiringi dengan dana yang dikelola oleh bendahara selaku pejabat fungsional).

2) Persentase Pengelolaan Aset yang Akuntabel

Dalam rangka penatausahaan aset daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penatausahaan aset daerah dalam rangka menciptakan sistem administrasi yang terstruktur, rapi dan akuntabel tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selalu melaksanakan inventarisasi. Inventarisasi yang dimaksud adalah pencatatan dan pengumpulan data agar data yang dikelola oleh BPKAD relevan dengan kondisi dan situasi data saat ini. Pada tahun anggaran 2016 Sampai dengan tahun 2020 sebanyak 30 OPD dan tahun 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 sebanyak 34 OPD termasuk kecamatan titik/obyek telah terinventarisasi.

Data-data terbaru hasil inventarisasi selanjutnya di update ke dalam pengembangan sistem informasi aset daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk inventarisasi/ mapping aset daerah dan memastikan apakah data barang milik daerah sudah sesuai dengan neraca masing-masing SKPD. Inventarisasi selalu di dukung oleh OPD kabupaten Tana Tidung. Setiap Tahunnya OPD selalu melakukan Rekon di BPKAD guna mensinkronisasikan aset yang ada di setiap OPD. Dimana aset tetap kabupaten Tana Tidung tahun 2024 sebesar Rp.4.986.862.687.716,93 dan untuk aset lainnya sebesar Rp.205.736.364.534,94

IK : Persentase Pengelolaan Aset yang Akuntabel :

$$= \frac{\text{Jumlah Data Aset Daerah Yang Terinventarisasi}}{\text{Jumlah Seluruh Aset Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 5.192.599.052.251,87}}{\text{Rp. 5.192.599.052.251,87}} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga telah menyelesaikan serah terima Tanah/aset antara Pemerintahan Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Tana Tidung. Namun, dalam upaya-upaya penertiban penatausahaan aset daerah masih banyak dijumpai tanah/aset yang belum mempunyai sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi prioritas utama bidang aset di tahun 2025 yang akan datang.

9) Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka pencapaian sasaran Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator Kinerja ini menggambarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024. Komponen Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari atas :

- 1. Pendapatan Pajak Daerah
- 2. Pendapatan Retribusi Daerah
- 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 50.924.195.552,00 Realisasi PAD Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 49.605.577.369,47 . Adapun pada Tahun 2023 Realisasi PAD Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar Rp. 33.971.186.394,43 sehingga perhitungan capaian indikator Persentase Pertumbuhan PAD

dapat disajikan dalam formulasi sebagai berikut :

IK : Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

$$= \frac{(\text{Jumlah Pendapatan Tahun (n)} - \text{Jumlah Pendapatan Tahun (n-1)})}{\text{Jumlah Pendapatan Tahun (n-1)}} \times 100\%$$
$$= \frac{(\text{Rp } 49.605.577.369,47 - \text{Rp. } 33.971.186.394,43)}{\text{Rp. } 33.971.186.394,43} \times 100\%$$
$$= 46,02\%$$

Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah KabupatenTana Tidung Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

NO	URAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	PAD (%) 2023	CAPAIAN IK PERTUMBUHAN PAD (%) 2024
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = (4 - 5)/5*100
1	Pajak Daerah	Rp. 4.605.000.000,00	Rp. 7.805.491.207.63	Rp. 9.509.876.047,15	169,5	-1,79
2	Retribusi Daerah	Rp.725.000.000,00	Rp. 702.461.634	Rp. 1.132.406.153,00	96,89	-0,38
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.7.087.060.000,00	Rp. 4.930.224.687,96	Rp. 4.816.815.131,72	69,56	2,354
4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp.38.507.135.552,00	Rp. 36.167.399.839,88	Rp. 18.512.089.062,56	93,92	95,37
JUMLAH		Rp 50.924.195.552,00	Rp.49.605.577.369,47	Rp. 33.971.186.394,43		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwasanya total realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 dan 2023, dimana pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 46,02%. Dimana Pendapatan Pajak Daerah sebesar -1,79 %, Pendapatan Retribusi Daerah -0,38% dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2.354 %, Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami Peningkatan sebesar 95,37%.

REKAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	Rp 25.920.364.265,73	Rp 54.112.924.196,00	Rp 22.189.831.500,00	Rp 28.576.598.748,00	Rp 50.924.195.552,00
REALISASI	Rp 11.941.721.402,71	Rp 19.857.987.030,66	Rp 20.063.955.045,36	Rp 33.971.186.394,43	Rp 49.605.577.369,47
PERSENTASE	46,07%	36,70%	90,42%	118,88%	97,41%

REKAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

TAHUN	2020	2021	2022	2023
PERSENTASE CAPAIAN IKU	-41,20%	66,29%	1,04%	69,31%

Tabel Evaluasi Terhadap Hasil RENJA BPKAD
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

No	Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)			Realisasi s.d Triwulan IV			Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Kelompok Sasaran	
								Kinerja		Pagu							
								K	Satuan	Rp	Kinerja	Satuan	Pagu	K	Pagu (Rp)		
1	2					3	45					10			12		13
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	5	02				KEUANGAN (BPKAD)				Rp 40.223.975.183,00			Rp 27.611.449.354,00		68,64%	BPKAD	
	5	02	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	Rp 27.600.545.227,00	100	%	Rp. 18.026.708.394,00	100,00%	65,31%	Sekretariat BPKAD	
1	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Laporan Sakip dan Keuangan	100	%	Rp 30.100.000,00	100	%	Rp 26.430.000,00	100.00%	87,80%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan	
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renstra, Renja, IKU, PK, RKT, RKA-DPA,RUP, RTP, Cascading, Rencana Aksi)	7	Dokumen	Rp 15.050.000,00	7	Dokumen	Rp 12.630.000,00	100.00%	83,92%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan	

	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi (Lakip, LPPD, CALK, Laporan Realisasi Triwulan)	4	Laporan	Rp 15.050.000,00	4	Laporan	Rp 13.800.000,00	100.00%	91,69%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan
2	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100	%	Rp 21.301.679.727,00	100	%	Rp 12.784.288.108,00	100.00%	60,01%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	49	Orang	Rp 20.541.899.727,00	49	Orang	Rp 12.164.416.508,00	100.00%	59,22%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan
	5	02	01	2.02	06	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium kegiatan	2	Orang	Rp 759.780.000,00	2	Orang	Rp 619.871.600,00	100.00%	81,58%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan
3	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya ASN yang terdidik dan terlatih	100	%	Rp 325.381.600,00	100	%	Rp 172.464.900,00	100,00%	53,00%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0,-	0	Paket		0	0	

	5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9	Orang	Rp 325.381.600,00	9	Orang	Rp 172.464.900,00	100,00%	53,00%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	100%	%	Rp 2.968.922.300,00	100%	%	Rp 2.665.462.155,00	100.00%	89,77%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	52.944.700,00	1	Paket	Rp 10.950.000,00	100%	20,68%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian -
	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5	Paket	843.789.000,00	5	Paket	Rp 751.429.500,00	100%	89,05%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket	906.820.700,00	4	Paket	Rp 730.340.750,00	100%	80,53%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	225.126.500,00	2	Paket	Rp 219.959.000,00	100%	97,70%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	250.000.000,00	24	Dokumen	Rp 250.000.000,00	100%	100%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.06	09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60	Laporan	1.534.030.400,00	60	Laporan	Rp 1.454.212.405,00	100%	94,80%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	%	Rp 1.647.562.000,00	100%	%	Rp 1.359.922.331,00	100.00%	82,54%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	2	Laporan	Rp 19.992.000,00	2	Laporan	Rp 18.300.000,00	100.00%	91,53%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Internet (Wifi), Air bersih dan Listrik Kantor yang tersedia	36	Laporan	857.185.000,00	36	Laporan	Rp 735.256.572,00	100.00%	85,77%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12	Laporan	770.385.000,00,-	12	Laporan	Rp 606.365.759,00	100.00%	78,71%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	%	Rp 483.110.600,00	100%	%	Rp 266.711.400,00	100.00%	55,21%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	4	Unit	399.610.600,00	4	Unit	Rp 197.921.400,00	100.00%	49,53%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	21	Unit	83.500.000,00	21	Unit	Rp 68.790.000,00	100.00%	82,38%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan dan penetapan APBD yang tepat waktu	100%	%	Rp 7.909.074.000,00	100%	%	Rp 5.880.775.705,00	100.00%	74,35%	Bidang Keuangan
							Persentase atas hasil Monitoring dana kas daerah atas pendapatan, pembiayaan, dan Realisasi Belanja	100%	%		100%	%		100.00%		
							Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	100%	%		100%	%		100.00%		
7	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran daerah	82%	%	Rp 3.790.907.600,00	101%	%	Rp 3.036.790.013,00	101.00%	80,10%	Sub Bidang Anggaran
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	Dokumen	180.114.200,00	2	Dokumen	Rp 132.280.000,00	100.00%	73,44%	Sub Bidang Anggaran
	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2	Dokumen	180.114.200,00	2	Dokumen	Rp 140.330.000,00	100.00%	77,91%	Sub Bidang Anggaran
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD	2	Dokumen	447.142.600,00	2	Dokumen	Rp 261.711.100,00	100.00%	58,53%	Sub Bidang Anggaran

	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perbub tentang penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	457.405.000,00	2	Dokumen	Rp 304.155.800,00	100.00%	66,50%	Sub Bidang Anggaran
--	---	----	----	------	----	---	---	---	---------	----------------	---	---------	----------------------	---------	--------	------------------------

	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi bidang anggaran yang disusun	2	Dokumen	1.027.696.200,00	2	Dokumen	Rp 822.353.848,00	100.00%	80,02%	Sub Bidang Anggaran
	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan	34	Orang	1.498.435.400,00	34	Orang	Rp 1.375.959.265,00	100.00%	91,82%	Sub Bidang Anggaran
8	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase hasil monitoring dana kas daerah	82%	%	Rp 2.179.456.400,00	100%	%	Rp 1.345.596.030,00	100.00%	61,74%	Sub Koordinator Perbendaharaan
	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan rekonsiliasi dana transfer pusat perimbangan	12	Laporan	320.206.000,00	12	Laporan	Rp 285.273.780,00	100.00%	89,09%	Sub Bidang Perbendaharaan
	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Saldo BKU dan Kas Umum Daerah	48	Laporan	988.222.400,00	48	Laporan	Rp 589.831.200,00	100.00%	59,68%	Sub Bidang Perbendaharaan
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak	12	Laporan	871.028.000,00	12	Laporan	Rp 470.491.050,00	100.00%	54,01%	Sub Bidang Perbendaharaan
9	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya laporan dan dokumen akuntansi dan keuangan	100%	%	Rp 1.938.710.000,00	100%	%	Rp 1.498.389.662,00	100.00%	77,29%	Sub Bidang Akuntansi
	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Laporan Keuangannya sesuai dengan SAP	34	Opd	1.319.654.000,00	34	Opd	Rp 979.742.590,00	100.00%	74,24%	Sub Bidang Akuntansi
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) dan Rancangan Peraturan Bupati (RaPerbup) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Dokumen	313.000.000,00	2	Dokumen	Rp 252.992.722,00	100.00%	80,83%	Sub Bidang Akuntansi

	5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan LKPD	1	Laporan	306.056.000,00	1	Laporan	Rp 265.654.350,00	100.00%	86,80%	Sub Bidang Akuntansi
10	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan Dana Darurat dan Mendesak	82%	%	Rp 2.000.000.000,00	-	%	Rp -	0.00%	0.00%	Sub Bidang Perbendaharaan
	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana yang disediakan	3	Laporan	2.000.000.000,00	-	Laporan	Rp -	0.00%	0.00%	Sub Bidang Perbendaharaan
	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan dan penyampaian Laporan BMD yang tepat waktu	92%	%	Rp 2.182.603.100,00	100%	%	Rp 1.833.841.967,00	92%	84,02%	Bidang Aset
11	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dikelola	92%	%	Rp 2.182.603.100,00	100%	%	Rp 1.833.841.967,00	92%	84,02%	Bidang Aset
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	Dokumen	282.845.500,00	4	Dokumen	Rp 250.896.209,00	100%	88,70%	Sub Koordinator Analisis Kebijakan
	5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	163.589.000,00	0	Dokumen	Rp 161.134.400,00	0%	98,50%	Sub Koordinator Analisis Kebijakan
	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25	Dokumen	99.912.000,00	25	Dokumen	Rp 68.332.634,00	100%	68,39%	Sub Koordinator Analisis Kebijakan
	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	46.346.000,00	0	Dokumen	Rp 20.139.900,00	0%	43,45%	Sub Koordinator Analisis Kebijakan
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	34	Laporan	104.002.200,00	31	Laporan	Rp 89.724.900,00	91,18%	86,27%	Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	10	Laporan	95.074.000,00	10	Laporan	Rp 53.283.600,00	100%	56,04%	Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset

	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	225.239.600,00	2	Laporan	Rp 181.425.749,00	100%	80,54%	Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset
--	---	----	----	------	----	-------------------------------	---	---	---------	----------------	---	---------	----------------------	------	--------	---

	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	309.833.000,00	1	Laporan	Rp 246.733.573,00	100%	79,63%	Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	34	Dokumen	217.894.600,00	34	Dokumen	Rp 176.643.567,00	100%	81,07	Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset
	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	68	Laporan	190.062.000,00	68	Laporan	Rp 162.375.600,00	100%	85,43%	Sub Koordinator Analis Kebijakan
	5	02	03	2.01	12	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	68	Laporan	447.315.200,00	68	Laporan	Rp 423.151.835,00	100%	94,60%	Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset
	5	02	03	2.01	13	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	102	Orang	490.000,00		Orang	Rp	0	0	Sub Koordinator Analis Kebijakan
	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	90%	%	Rp 2.531.752.856,00	96,89%	%	Rp 1.870.123.288,00	107,66%	73,87%	BIDANG PENDTAAN & BIDANG PENDAPATAN
							Persentase Peningkatan Potensi Pajak dan Retribusi Derah	7%	%		7%	%		100%		
12	5	02	04	2.01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD	28.576.598.748	Rupiah	Rp 2.531.752.856,00	27.688.643.259	%	Rp 1.870.123.288,00	96,89%	73,87%	BIDANG PENDTAAN & BIDANG PENDAPATAN
	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah kebijakan pajak daerah yang disusun	1	Dokumen	91.530.000,00	1	Dokumen	Rp 79.000.800,00	100%	86,31%	Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah desa yang diberikan informasi mengenai kebijakan pajak daerah	32	Laporan	527.375.356,00	32	Laporan	Rp 409.611.070,00	100%	77,67%	Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
	5	02	04	2.01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang disediakan	5	Unit	103.972.500,00	5	Unit	Rp 71.540.000,00	100%	68,80%	Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah objek pajak yang didaftarkan	1	Laporan	501.519.100,00	1	Laporan	Rp 277.850.308,00	100%	55,40%	Sub Bidang PBB dan BPHTB
	5	02	04	2.01	06	Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Objek PBB-P2 yang dipelihara	1	Laporan	13.390.000,00	1	Laporan	Rp 7.554.800,00	100%	56,42%	Sub Bidang PBB dan BPHTB
	5	02	04	2.01	07	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah nilai PBB-P2 dan BPHTB yang ditetapkan	6000	Objek Pajak	354.348.600,00	6000	Objek Pajak	Rp 289.085.370,00	100%	81,58%	Sub Bidang PBB dan BPHTB
	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	1	Dokumen	169.950.000,00	1	Dokumen	Rp 87.610.900,00	100%	51,55%	Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tagihan dan tunggakan pajak	1	Dokumen	216.260.000,00	1	Dokumen	Rp 183.472.200,00	100%	84,84%	Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak
	5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2	Dokumen	54.969.400,00	0	Dokumen	Rp 43.904.300,00	0%	79,87%	Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak
	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan objek pajak	12	Dokumen	235.039.000,00	12	Dokumen	Rp 170.924.360,00	100%	72,72%	Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan
	5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi, pembinaan dan pengawasan terhadap OPD pengelola dan desa	4	Laporan	263.398.900,00	4	Laporan	Rp 249.569.180,00	100%	94,75%	Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan

Analisis atas capaian target kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 68,64

% atau sebesar Rp. 27.611.449.354,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 40.247.975.183,00 dan;

Persentase Rata-rata realisasi capaian kinerja dari keseluruhan Program/Kegiatan yaitu 100%

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diselenggarakan melalui 6 (Enam) kegiatan dan 16 (Enam Belas) sub kegiatan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 27.600.545.227,00 sampai dengan akhir triwulan IV, telah terealisasi keuangan sebesar Rp 18.026.708.394,00 dengan capaian keuangan 65,31% dan capaian kinerja 100%

1.2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diselenggarakan melalui 4 (Empat) kegiatan dan 13 (Tiga Belas) sub kegiatan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 7.909.074.000,00 sampai dengan akhir triwulan IV, telah terealisasi keuangan sebesar Rp 5.880.775.705,00 dengan capaian keuangan 74,35 % dan capaian kinerja 100% .

1.3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diselenggarakan melalui 1 (Satu) kegiatan dan 11 (Sebelas) sub kegiatan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 2.182.603.100,00 sampai dengan akhir triwulan IV, telah terealisasi keuangan sebesar Rp 1.833.841.967,00 dengan capaian keuangan 92% dan capaian kinerja 84,02%.

1.4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diselenggarakan melalui 1 (Satu) kegiatan dan 11 (Sebelas) sub kegiatan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 2.531.752.856,00 sampai dengan akhir triwulan IV, telah terealisasi keuangan sebesar Rp 1.870.123.288,00 dengan capaian keuangan 73,87% dan capaian kinerja 96,89%

Hal-hal yang dapat mendukung pencapaian target

1. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan
2. Motivasi, arahan dan bimbingan dari pimpinan
3. Koordinasi yang baik dan saling mendukung antar pegawai
4. Fasilitas yang cukup memadai

Hambatan dan Kendala :

Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu, antara lain:

1. Fungsi perangkat daerah belum berjalan optimal dan pelaksanaan monitoring terhadap kinerja perangkat daerah juga belum optimal;
2. Terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru diikuti RPJMD baru dan dalam waktu bersamaan diberlakukan sistem aplikasi baru, yaitu: SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);
3. Hampir seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa masih belum melakukan penunjukan atau

pengadaan langsung;

4. Keterlambatan pencairan anggaran perangkat daerah akibat terlambatnya penyampaian pertanggungjawaban keuangan sehingga realisasi fisik dan keuangan menjadi timpang;
5. Server Aplikasi SIPD yang sering overload sehingga proses pencairan menjadi terlambat.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi/saran sebagai tindak lanjut evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Seluruh sub bagian di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja SKPD dapat cepat diketahui;
2. Mengikut sertakan aparatur penyusun program/kegiatan dalam diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran;
3. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana;
4. Proses pergeseran yang sifatnya dinamis dengan frekuensi yang makin berkurang hingga tercapai keseimbangan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga belanja bisa terlaksana tanpa banyak deviasi;
5. Komponen belanja yang makin detail sehingga para perencana akan lebih mudah dalam merencanakan pembelanjaan, kalau slot komponen semakin beragam dan menyentuh hingga komponen terkecil sekalipun.

Realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 sebesar 68,60 % atau sebesar Rp. 27.611.449.354,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 40.247.975.183,00. Hal ini menunjukkan Realisasi keuangan yang menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 54,91% atau sebesar Rp. 32.648.703.830,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 59.459.187.527,00 dan rincian realisasi keuangan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA BPKAD
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023

No	Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Realisasi s.d Triwulan IV			Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Kelompok Sasaran	
								Kinerja		Pagu							
								K	Satuan	Rp	Kinerja	Satuan	Pagu	K	Pagu (Rp)		
1	2					3	4			5		10			12		13
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	5	02				KEUANGAN (BPKAD)				Rp 59.459.187.527,00			Rp 32.648.703.830,00		54,91%	BPKAD	
	5	02	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	Rp 35.968.612.135,00	100	%	Rp 23.019.478.527	100,00%	64,00%	Sekretariat BPKAD	
1	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Laporan Sakip dan Keuangan	100	%	Rp 20.000.000,00	100	%	Rp 19.125.000,00	100.00%	95,63%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan	
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renstra, Renja, IKU, PK, RKT, RKA-DPA,RUP, RTP, Cascading, Rencana Aksi)	7	Dokumen	Rp 10.000.000,00	7	Dokumen	Rp 9.625.000,00	100.00%	96.25%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan	

	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi (Lakip, LPPD, CALK, Laporan Realisasi Triwulan)	4	Laporan	Rp 10.000.000,00	4	Laporan	Rp 9.500.000,00	100.00%	95,00%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan
2	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100	%	Rp 28.325.603.064,00	100	%	Rp 17.241.086.391,00	100.00%	60,87%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	49	Orang	Rp 27.748.523.064,00	49	Orang	Rp 16.700.856.391,00	100.00%	60,19%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan
	5	02	01	2.02	06	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium kegiatan	2	Orang	Rp 577.080.000,00	2	Orang	Rp 540.230.000,00	100.00%	93,61%	Sub Koordinator Perencanaan, Program dan Keuangan
3	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya ASN yang terdidik dan terlatih	100	%	Rp 811.876.520,00	100	%	Rp 202.485.173,00	100,00%	24,94%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	53.040.000,-	1	Paket	52.530.000,00	100,00%	99,04%	

	5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9	Orang	Rp 758.836.520,00	9	Orang	Rp 149.955.173,00	100,00%	19,76%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	100%	%	Rp 4.554.003.399,00	100%	%	Rp 3.726.086.521,00	100.00%	81,82%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4,980,976.00	1	Paket	Rp 4,876,000.00	100%	97.89%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian -
	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5	Paket	2,024,150,825.00	5	Paket	Rp 1,646,814,075.00	100%	81.36%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket	1,117,795,318.00	4	Paket	Rp 863,862,300.00	100%	77.28%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	163,347,400.00	2	Paket	Rp 156,432,800.00	100%	95.77%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	150,000,000.00	24	Dokumen	Rp 147,500,000.00	100%	98.33%	Rp 57,500,000.00
	5	02	01	2.06	09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60	Laporan	1,093,728,880.00	60	Laporan	Rp 906,601,346.00	100%	82.89%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	%	Rp 1.733.051.796,00	100%	%	Rp 1.447.806.442,00	100.00%	83,54%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	2	Laporan	Rp 15,000,000.00	2	Laporan	Rp 11,000,000.00	100.00%	73,33%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Internet (Wifi), Air bersih dan Listrik Kantor yang tersedia	36	Laporan	877.631.796,00	36	Laporan	Rp 720.136.332,00	100.00%	82,05%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12	Laporan	840.420.000,-	12	Laporan	Rp 716.670.110,00	100.00%	85,28%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	%	Rp 524.077.356,00	100%	%	Rp 382.889.000,00	100.00%	73,06%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	4	Unit	383.327.356,00	4	Unit	Rp 274.954.000,00	100.00%	95.40%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	21	Unit	140.750.000,00	21	Unit	Rp 107.935.000,00	100.00%	63.00%	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan dan penetapan APBD yang tepat waktu	100%	%	Rp 17.799.785.499,00	100%	%	Rp 5.333.465.193,00	100.00%	29,96%	Bidang Keuangan
							Persentase atas hasil Monitoring dana kas daerah atas pendapatan, pembiayaan, dan Realisasi Belanja	100%	%		100%	%		100.00%		
							Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	100%	%		100%	%		100.00%		
7	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran daerah	82%	%	Rp 3,342,423,853.00	101%	%	Rp 2,466,391,778.00	101.00%	73.79%	Sub Bidang Anggaran
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2	Dokumen	164,588,088.00	2	Dokumen	Rp 133,388,000.00	100.00%	81.04%	Sub Bidang Anggaran
	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2	Dokumen	163,588,088.00	2	Dokumen	Rp 114,038,000.00	100.00%	69.71%	Sub Bidang Anggaran
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD	2	Dokumen	389,496,264.00	2	Dokumen	Rp 220,260,000.00	100.00%	56.55%	Sub Bidang Anggaran
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda tentang Perubahan APBD dan Perbub tentang penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	462,578,264.00	2	Dokumen	Rp 274,952,930.00	100.00%	59.44%	Sub Bidang Anggaran

	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah regulasi bidang anggaran yang disusun	2	Dokumen	1,527,874,800.00	2	Dokumen	Rp 612,924,844.00	100.00%	40.12%	Sub Bidang Anggaran
	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan	34	Orang	1,610,341,000.00	34	Orang	Rp 1,514,998,227.00	100.00%	94.08%	Sub Bidang Anggaran
8	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase hasil monitoring dana kas daerah	82%	%	Rp 4.318.466.504,00	100%	%	Rp 2.870.562.001,00	100.00%	66,47%	Sub Koordinator Perbendaharaan
	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan rekonsiliasi dana transfer pusat perimbangan	12	Laporan	237,919,700.00	12	Laporan	Rp 231,169,994.00	100.00%	97.16%	Sub Bidang Perbendaharaan
	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Saldo BKU dan Kas Umum Daerah	48	Laporan	828,464,106.00	48	Laporan	Rp 642,391,094.00	100.00%	77.54%	Sub Bidang Perbendaharaan
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Laporan Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak	12	Laporan	284,755,044.00	12	Laporan	Rp 257,256,200.00	100.00%	90.34%	Sub Bidang Perbendaharaan
9	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya laporan dan dokumen akuntansi dan keuangan	100%	%	Rp 1.564.174.572,00	100%	%	Rp 1.332.085.904,00	100.00%	85,16%	Sub Bidang Akuntansi
	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang Laporan Keuangannya sesuai dengan SAP	34	Opd	1,018,990,284.00	34	Opd	Rp 913,388,722.00	100.00%	89.64%	Sub Bidang Akuntansi
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) dan Rancangan Peraturan Bupati (RaPerbup) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Dokumen	259,078,000.00	2	Dokumen	Rp 209,145,600.00	100.00%	80.73%	Sub Bidang Akuntansi

	5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan LKPD	1	Laporan	286,106,288.00	1	Laporan	Rp 209,551,582.00	100.00%	73.24%	Sub Bidang Akuntansi
10	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan Dana Darurat dan Mendesak	82%	%	Rp 10.566.005.573,00	-	%	Rp -	0.00%	0.00%	Sub Bidang Perbendaharaan
	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana yang disediakan	3	Laporan	10.566.005.573,00	-	Laporan	Rp -	0.00%	0.00%	Sub Bidang Perbendaharaan
	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan dan penyampaian Laporan BMD yang tepat waktu	90%	%	Rp 2.475.333.997,00	100%	%	Rp 2.149.339.038,00	96,53%	86,83%	Bidang Aset
11	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dikelola	90%	%	Rp 2.475.333.997,00	100%	%	Rp 2.149.339.038,00	88,89%	86,83%	Bidang Aset
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	Dokumen	557,658,248.00	4	Dokumen	Rp 524,583,634.00	100%	94.07%	Sub Koordinator Analis Kebijakan
	5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	650,000.00	0	Dokumen	Rp -	0%	0.00%	Sub Koordinator Analis Kebijakan
	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25	Dokumen	47,728,824.00	25	Dokumen	Rp 45,237,760.00	100%	94.78%	Sub Koordinator Analis Kebijakan
	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	650,000.00	0	Dokumen	Rp -	0%	0.00%	Sub Koordinator Analis Kebijakan
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	34	Laporan	273,267,625.00	31	Laporan	Rp 256,296,625.00	91,18%	93.79%	Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	10	Laporan	270,297,000.00	10	Laporan	Rp 176,787,712.00	100%	65.40%	Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset
	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Laporan	154,348,000.00	2	Laporan	Rp 124,217,360.00	100%	80.48%	Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset

	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	684,734,000.00	1	Laporan	Rp 623,296,593.00	100%	91.03%	Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	34	Dokumen	188,547,000.00	34	Dokumen	Rp 163,632,730.00	100%	86.79%	Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Aset
	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	68	Laporan	38,377,000.00	68	Laporan	Rp 38,307,000.00	100%	99.82%	Sub Koordinator Analis Kebijakan
	5	02	03	2.01	12	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	68	Laporan	63,603,550.00	68	Laporan	Rp 37,695,048.00	100%	59.27%	Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset
	5	02	03	2.01	13	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	102	Orang	195,472,750.00	102	Orang	Rp 159,284,576.00	100%	81.49%	Sub Koordinator Analis Kebijakan
	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	90%	%	Rp 3.215.455.896,00	96,89%	%	Rp 2.146.421.072,00	107,66%	66,75%	BIDANG PENDTAAN & BIDANG PENDAPATAN
							Persentase Peningkatan Potensi Pajak dan Retribusi Derah	7%	%		7%	%		100%		
12	5	02	04	2.01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD	28.576.598.748	Rupiah	Rp 3.215.455.896,00	27.688.643.259	%	Rp 2.146.421.072,00	96,89%	66,75%	BIDANG PENDTAAN & BIDANG PENDAPATAN
	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah kebijakan pajak daerah yang disusun	1	Dokumen	242,144,320.00	1	Dokumen	Rp 162,529,800.00	100%	67.12%	Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah desa yang diberikan informasi mengenai kebijakan pajak daerah	32	Laporan	209,039,200.00	32	Laporan	Rp 139,770,000.00	100%	66.86%	Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
	5	02	04	2.01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang disediakan	5	Unit	96,662,270.00	5	Unit	Rp 85,686,000.00	100%	88.64%	Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah objek pajak yang didaftarkan	1	Laporan	331,604,594.00	1	Laporan	Rp 206,463,942.00	100%	62.26%	Sub Bidang PBB dan BPHTB
	5	02	04	2.01	06	Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Objek PBB-P2 yang dipelihara	1	Laporan	42,266,720.00	1	Laporan	Rp 30,627,800.00	100%	72.46%	Sub Bidang PBB dan BPHTB
	5	02	04	2.01	07	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah nilai PBB-P2 dan BPHTB yang ditetapkan	6000	Objek Pajak	169,417,472.00	6000	Objek Pajak	Rp 156,865,200.00	100%	92.59%	Sub Bidang PBB dan BPHTB
	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	1	Dokumen	111,940,000.00	1	Dokumen	Rp 7,149,000.00	100%	6.39%	Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah
	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase tagihan dan tunggakan pajak	1	Dokumen	328,844,750.00	1	Dokumen	Rp 171,600,880.00	100%	52.18%	Sub Bidang Penagihan dan KeberatanPajak
	5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2	Dokumen	32,464,000.00	0	Dokumen	Rp 34,034,600.00	0%	104.84%	Sub Bidang Penagihan dan KeberatanPajak
	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan objek pajak	12	Dokumen	953,581,460.00	12	Dokumen	Rp 700,760,910.00	100%	73.49%	Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan
	5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi, pembinaan dan pengawasan terhadap OPD pengelola dan desa	4	Laporan	697,491,110.00	4	Laporan	Rp 450,932,940.00	100%	64.65%	Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan

Realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II mencapai 22,01 % atau sebesar Rp. 7.253.452.930,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 32.947.828.982,00.

Tabel Evaluasi Terhadap Hasil RENJA BPKAD
Kabupaten Tana Tidung
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan/Program/Kegi atan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi s.d Triwulan II		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja S.D TW I (%)		
								Kinerja		Pagu	I		II					
								K	S	Rp	K	Rp	K	Rp	Kinerj a	Pagu	K	Rp
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
	5	0 2				KEUANGAN (BPKAD)			Rp 32,947,828,982.00		Rp 5,596,654,784.00		Rp 1,656,798,146.00		Rp 7,253,452,930.00		22.01	
	5	0 2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Persentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100	%	Rp 24,978,626,182.00	25	Rp 4,423,215,376.00	25	Rp 1,292,962,972.00	50	Rp 5,716,178,348.00	50	22.88
1	5	0 2	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Laporan Sakip dan Keuangan	100	%	Rp 19,999,000.00	25	Rp -	17	Rp -	42	Rp -	42	-

	5	0 2	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokume n	9,999,500.00	2.00	Rp -	1.00	Rp -	3.00	Rp -	42.86	-
	5	0 2	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	9,999,500.00	1.00	Rp -	1.00	Rp -	2.00	Rp -	40.00	-
2	5	0 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100	%	Rp 21,049,861,782.00	24.92	Rp 3,503,275,879.00	25.08	Rp 870,359,052.00	50.00	Rp 4,373,634,931.00	50.00	20.78
	5	0 2	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588	Orang	20,279,461,782.00	147.00	Rp 3,503,275,879.00	147.00	Rp 870,359,052.00	294.00	Rp 4,373,634,931.00	50.00	21.57
	5	0 2	0 1	2.0 2	0 6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dokume n	770,400,000.00	-	Rp -	1.00	Rp -	1.00	Rp -	50.00	-
3	5	0 2	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya ASN yang terdidik dan terlatih	90	%	Rp 165,558,000.00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-
	5	0 2	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket		-	Rp -			-	Rp -	-	#DIV/ 0!
	5	0 2	0 1	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	Orang	165,558,000.00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-

4	5	0 2	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	90	%	Rp 1,685,346,000.00	35.42	Rp 500,330,680.00	3.13	Rp 260,962,810.00	38.54	Rp 761,293,490.00	42.82	45.17
	5	0 2	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	4,983,200.00	-	Rp -		Rp -	-	Rp -	-	-
	5	0 2	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	304,059,400.00	1.00	Rp 173,751,000.00	3.00	Rp 103,600,000.00	4.00	Rp 277,351,000.00	80.00	91.22
	5	0 2	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	553,274,200.00	2.00	Rp 127,605,000.00	-	Rp 54,140,000.00	2.00	Rp 181,745,000.00	50.00	32.85
	5	0 2	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	85,254,000.00	1.00	Rp 22,500,000.00	-	Rp 48,355,000.00	1.00	Rp 70,855,000.00	50.00	83.11
	5	0 2	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	24	Dokume n	150,000,000.00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-
	5	0 2	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	587,775,200.00	30.00	Rp 176,474,680.00	-	Rp 54,867,810.00	30.00	Rp 231,342,490.00	50.00	39.36
5	5	0 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	%	Rp 1,614,890,000.00	20	Rp 388,211,317.00	22	Rp 161,641,110.00	42	Rp 549,852,427.00	42	34.05

	5	0 2	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	15,000,000.00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-
	5	0 2	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	829,505,000.00	5.00	Rp 263,411,317.00	11.00	Rp 101,641,110.00	16.00	Rp 365,052,427.00	44.44	44.01
	5	0 2	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	770,385,000.00	5.00	Rp 124,800,000.00	-	Rp 60,000,000.00	5.00	Rp 184,800,000.00	41.67	23.99
6	5	0 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90	%	Rp 442,971,400.00	4	Rp 31,397,500.00	-	Rp -	4.00	Rp 31,397,500.00	4.44	7.09
	5	0 2	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	349,471,400.00	1.00	Rp 31,397,500.00	-	Rp -	1.00	Rp 31,397,500.00	25.00	8.98
	5	0 2	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21	Unit	93,500,000.00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-

	5	0 2	0 2	2.0 1	0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	188,292,000.00	-	Rp -	-	Rp 11,023,800.00	-	Rp 11,023,800.00	-	5.85
	5	0 2	0 2	2.0 1	0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen	456,426,000.00	-	Rp 34,700,000.00	1.00	Rp 3,495,000.00	1.00	Rp 38,195,000.00	100.00	8.37
	5	0 2	0 2	2.0 1	1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200	Orang	914,760,400.00	50.00	Rp 216,900,000.00	150.00	Rp 89,365,914.00	200.00	Rp 306,265,914.00	100.00	33.48
8	5	0 2	0 2	2.0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase hasil monitoring dana kas daerah	100	%	Rp 449,998,400.00	25.00	Rp 150,169,400.00	25.00	Rp 72,270,400.00	50.00	Rp 222,439,800.00	50.00	49.43
	5	0 2	0 2	2.0 2	0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	110,728,300.00	3.00	Rp 43,146,400.00	3.00	Rp -	6.00	Rp 43,146,400.00	50.00	38.97
	5	0 2	0 2	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan	12	Laporan	245,881,600.00	3.00	Rp 36,400,000.00	3.00	Rp 72,270,400.00	6.00	Rp 108,670,400.00	50.00	44.20

							Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)												
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	Dokumen	93,388,500.00	3.00	Rp 70,623,000.00	3.00	Rp -	6.00	Rp 70,623,000.00	50.00	75.62	
9	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase tersedianya laporan dan dokumen akuntansi dan keuangan	100	%	Rp 839,726,000.00	11.76	Rp 188,566,800.00	11.76	Rp 56,143,800.00	23.53	Rp 244,710,600.00	23.53	29.14	
	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	29	Laporan	360,420,000.00	8.00	Rp 20,809,900.00	8.00	Rp 44,120,000.00	16.00	Rp 64,929,900.00	55.17	18.02	
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dokumen	192,000,000.00	-	Rp 12,129,600.00	2.00	Rp -	2.00	Rp 12,129,600.00	100.00	6.32	
	5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	287,306,000.00	1.00	Rp 155,627,300.00	-	Rp 12,023,800.00	1.00	Rp 167,651,100.00	100.00	58.35	

10	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan Dana Darurat dan Mendesak	82	%	Rp 2,000,000,000.00	-	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	-	-
	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2	Laporan	2,000,000,000.00	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan dan penyampaian Laporan BMD yang tepat waktu	90	%	Rp 1,001,040,500.00	-	Rp 121,034,200.00	5.00	Rp 62,219,000.00	5.00	Rp 183,253,200.00	5.56	18.31
11	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Aset yang sesuai SAP	92	%	Rp 1,001,040,500.00	-	Rp 121,034,200.00	5.00	Rp 62,219,000.00	5.00	Rp 183,253,200.00	5.43	18.31
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	Dokumen	204,755,500.00	-	Rp 27,277,000.00	2.00	Rp 9,997,200.00	2.00	Rp 37,274,200.00	50.00	18.20
	5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	490,000.00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-
	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25	Dokumen	49,936,000.00	-	Rp -	-	Rp 7,997,200.00	-	Rp 7,997,200.00	-	16.01
	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	46,346,000.00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	34	Laporan	91,542,200.00	2.00	Rp 30,175,400.00	6.00	Rp 19,097,200.00	8.00	Rp 49,272,600.00	23.53	53.83
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	10	Laporan	55,082,000.00	2.00	Rp -	1.00	Rp -	3.00	Rp -	30.00	-

	5	0 2	0 3	2.0 1	0 8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4	Laporan	132,418,000.00	-	Rp 18,324,800.00	1.00	Rp 16,547,200.00	1.00	Rp 34,872,000.00	25.00	26.33
	5	0 2	0 3	2.0 1	0 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	29,450,000.00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-
	5	0 2	0 3	2.0 1	1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3	Dokumen	95,648,600.00	-	Rp 11,631,400.00	1.00	Rp 8,580,200.00	1.00	Rp 20,211,600.00	33.33	21.13
	5	0 2	0 3	2.0 1	1 1	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34	Laporan	104,802,000.00	1.00	Rp 29,425,600.00	11.00	Rp -	12.00	Rp 29,425,600.00	35.29	28.08
	5	0 2	0 3	2.0 1	1 2	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Laporan	190,080,200.00	1.00	Rp 4,200,000.00		Rp -	1.00	Rp 4,200,000.00	50.00	2.21

	5	0 2	0 3	2.0 1	1 3	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	102	Orang	490,000.00	-	Rp -	102.00	Rp -	102.00	Rp -	100.00	-
	5	0 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	90	%	Rp 1,778,439,100.00	13.29	Rp 462,069,008.00	Rp45.73	Rp 69,317,260.00	59.02	Rp 531,386,268.00	65.58	29.88
							Jumlah Objek Pajak dan Objek Retribusi Daerah	7	%		1		1.00		2		28.57	
1 2	5	0 2	0 4	2.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan PAD		%	Rp 1,778,439,100.00	13.29	Rp 462,069,008.00	Rp 45.73	Rp 69,317,260.00	59.02	Rp 531,386,268.00	59.02	29.88
	5	0 2	0 4	2.0 1	0 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen	91,530,000.00	1.00	Rp 79,000,800.00	-	Rp -	1.00	Rp 79,000,800.00	100.00	86.31
	5	0 2	0 4	2.0 1	0 3	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20	Laporan	145,760,000.00	3.00	Rp -	2.00	Rp -	5.00	Rp -	25.00	-
	5	0 2	0 4	2.0 1	0 4	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	100	Unit	71,660,500.00	5.00	Rp -	25.00	Rp -	30.00	Rp -	30.00	-

	5	0 2	0 4	2.0 1	0 5	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4	Laporan	228,369,100.00	1.00	Rp 155,746,708.00	1.00	Rp 14,750,000.00	2.00	Rp 170,496,708.00	50.00	74.66
	5	0 2	0 4	2.0 1	0 6	Pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4	Laporan	13,390,000.00	1.00	Rp 7,554,800.00	1.00	Rp -	2.00	Rp 7,554,800.00	50.00	56.42
	5	0 2	0 4	2.0 1	0 7	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Daerah	700 0	Objek Pajak	239,346,600.00	2,000.0 0	Rp 32,807,200.00	-	Rp -	2,000	Rp 32,807,200.00	28.57	13.71
	5	0 2	0 4	2.0 1	0 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	500	Dokumen	60,548,000.00	100.00	Rp 31,684,000.00	-	Rp 16,092,400.00	100.00	Rp 47,776,400.00	20.00	78.91
	5	0 2	0 4	2.0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	116	Dokumen	166,650,000.00	-	Rp 87,498,000.00	58.00	Rp -	58.00	Rp 87,498,000.00	50.00	52.50
	5	0 2	0 4	2.0 1	1 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2	Dokumen	104,580,000.00	-	Rp 8,800,000.00	-	Rp -	-	Rp 8,800,000.00	-	8.41
	5	0 2	0 4	2.0 1	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	Dokumen	306,912,000.00	-	Rp 9,446,600.00	6.00	Rp 17,514,260.00	6.00	Rp 26,960,860.00	50.00	8.78
	5	0 2	0 4	2.0 1	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Laporan	349,692,900.00	-	Rp 49,530,900.00	6.00	Rp 20,960,600.00	6.00	Rp 70,491,500.00	50.00	20.16

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Keuangan, memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Keuangan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung mengacu pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan, keuangan dan aset sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, keuangan dan aset;
- 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pendapatan daerah;
- 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas keuangan;
- 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan aset
- 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, BPKAD memiliki tugas yang cukup strategis dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, pendapatan, dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping itu, BPKAD juga mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan Belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan Perbendaharaan Umum Daerah.

Dari tugas dan fungsi BPKAD diatas, BPKAD mengemban target pembangunan Kabupaten Tana Tidung dalam indikator kinerja pembangunan daerah pada urusan keuangan yaitu Opini BPK terhadap LKPD. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BPKAD sebagaimana table di bawah ini :

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Untuk itu berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

a. Permasalahan di Bidang Keuangan

1. Implementasi Transaksi Non Tunai
2. Sarana dan Prasarana kerja dalam penyusunan laporan akrual;
3. Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Penyediaan sarana prasana ruang kerja dan ruang arsip

b. Permasalahan di Bidang Pendapatan

1. Potensi yang belum Optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi
2. Menurunnya dana perimbangan serta tingginya ketergantungannya pendanaan dari pemerintah pusat dan propinsi
3. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak
4. Sistem administrasi pajak yang belum sempurna dan masih besarnya tunggakan pajak daerah, sehingga perlu penyempurnaan dan penegakan disiplin secara ketat.
5. Kurang optimal OPD terkait dalam menggali sumber-sumber pendapatan dari retribusi untuk meningkatkan PAD
6. Kurang sadarnya masyarakat akan penting pajak daerah untuk membangun kabupaten.

c. Permasalahan di Bidang Pendataan

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sarang burung walet
2. Wajib Pajak banyak yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Tana Tidung
3. Rendahnya kesadaran dan atau pemahaman serta kemampuan wajib pajak akan kewajibannya untuk menghitung sendiri, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya.

d. Permasalahan di Bidang Aset

1. Proses legalitas lahan aset tetap tanah (sertifikasi tanah);
2. Masih terdapat aset tetap yang belum diketahui keberadaannya;
3. Informasi proses-proses hibah yang tidak disampaikan ke bidangaset.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung mendukung Prioritas dan Sasaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 yaitu Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap Perubahan rancangan akhir RKPD Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap Perubahan rancangan akhir RKPD Tahun 2024

Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPKAD	Persentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	27.600.545.227,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	BPKAD	Persentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	27.600.545.227,00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase tersedianya Laporan Sakip dan Keuangan	100%	30.100.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase tersedianya Laporan Sakip dan Keuangan	100%	30.100.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.050.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.050.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	15.050.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	15.050.000,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100%	21.660.159.727,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100%	21.660.159.727,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 Orang	20.900.379.727,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 Orang	20.900.379.727,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	759.780.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	759.780.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase tersedianya ASN yang terdidik dan terlatih	90%	325.381.600,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase tersedianya ASN yang terdidik dan terlatih	90	325.381.600,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKAD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Pegawai	325.381.600,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BPKAD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Pegawai	325.381.600,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	90%	3.454.231.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan52an kantor	90%	3.454.231.300,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.944.700,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.944.700,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	843.789.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	843.789.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	906.820.700,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	906.820.700,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	225.126.500,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKAD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	225.126.500,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	250.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	250.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.175.550.400,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	1.175.550.400,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100%	1.647.562.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100%	1.647.562.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	19.992.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	19.992.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	857.185.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	857.185.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	770.385.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	770.385.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90%	483.110.600,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKAD	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90%	483.110.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	399.610.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	399.610.600,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	83.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	83.500.000,00

Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase penyusunan dan penetapan APBD yang tepat waktu	100%	9.909.074.000,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase penyusunan dan penetapan APBD yang tepat waktu	100%	9.909.074.000,00
		Persentase atas hasil Monitoring dana kas daerah atas pendapatan, pembiayaan, dan Realisasi Belanja	100%				Persentase atas hasil Monitoring dana kas daerah atas pendapatan, pembiayaan, dan Realisasi Belanja	100%	
		Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	100%				Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	100%	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran daerah	100%	3.790.907.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran daerah	100%	3.790.907.600,00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	180.114.200,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	180.114.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	180.114.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKAD	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	180.114.200,00

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	447.142.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	447.142.600,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	457.405.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	457.405.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1Dokumen	1.027.696.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKAD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1Dokumen	1.027.696.200,00
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	1.498.435.400,00	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	1.498.435.400,00
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase hasil monitoring dana kas daerah	100%	2.179.456.400,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD	Persentase hasil monitoring dana kas daerah	100%	2.179.456.400,00

Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	320.206.000,00	Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	320.206.000,00
---	-------	--	------------	----------------	---	-------	--	------------	----------------

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	988.222.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	988.222.400,00
--	-------	---	------------	----------------	--	-------	---	------------	----------------

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	871.028.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	871.028.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase tersedianya laporan dan dokumen akuntansi dan keuangan	100%	1.938.710.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase tersedianya laporan dan dokumen akuntansi dan keuangan	100%	1.938.710.000,00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	377 Laporan	1.319.654.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	377 Laporan	1.319.654.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	313.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	BPKAD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	313.000.000,00
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	306.056.000,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	306.056.000,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase penyerapan Dana Darurat dan Mendesak	82%	2,000,000,000.00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase penyerapan Dana Darurat dan Mendesak	82%	2,000,000,000.00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2,000,000,000.00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2,000,000,000.00

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penyusunan dan penyampaian Laporan BMD yang tepat waktu	90%	2.182.603.100,00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase penyusunan dan penyampaian Laporan BMD yang tepat waktu	90%	2.182.603.100,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD yang dikelola	90%	2.182.603.100,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase BMD yang dikelola	90%	2.182.603.100,00
Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	282.845.500,00	Penyusunan Standar Harga	BPKAD	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	282.845.500,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	163.589.000,00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	163.589.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25 Dokumen	99.912.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25 Dokumen	99.912.000,00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	46.346.000,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	46.346.000,00
Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	34 Laporan	104.002.200,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	34 Laporan	104.002.200,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	10 Laporan	95.074.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	10 Laporan	95.074.000,00

Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	225.239.600,00	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	225.239.600,00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	309.833.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	309.833.000,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	217.894.600,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	217.894.600,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34 Laporan	190.062.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34 Laporan	190.062.000,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	34 Laporan	447.315.200,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	34 Laporan	447.315.200,00

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	490,000.00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	490,000.00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD	Persentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	90%	2.531.752.856,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD	Persentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	90%	2.531.752.856,00
		Jumlah Objek Pajak dan Objek Retribusi Daerah	7%				Jumlah Objek Pajak dan Objek Retribusi Daerah	7%	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD	Realisasi PAD	Rp 20.587.060.000	2.531.752.856,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKAD	Realisasi PAD	Rp 20.587.060.000	2.531.752.856,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	91.530.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	91.530.000,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	527.375.356,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	527.375.356,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	100 Unit	103.972.500,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	100 Unit	103.972.500,00

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	501.519.100,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	501.519.100,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	13.390.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	13.390.000,00
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKAD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Daerah	5500 Objek Pajak	354.348.600,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	BPKAD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Daerah	5500 Objek Pajak	354.348.600,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	500 Dokumen	169.950.000,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	500 Dokumen	169.950.000,00
Penagihan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	116 Dokumen	216.260.000,00	Penagihan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	116 Dokumen	216.260.000,00
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	54.969.400,00	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	54.969.400,00

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	235.039.000,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	306,912,000.00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	263.398.900,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BPKAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	349,692,900.00
Jumlah				42.223.975.183,00	Jumlah				42.223.975.183,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi atau perguruan tinggi.

Mengingat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, maka telaahan terhadap usulan masyarakat lebih diutamakan dalam upaya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik dan akuntabel. Sehingga penyajian Tabel 2.4 tentang Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tidak dapat tersaji.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Rancangan Sembilan Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden yang disebut dengan Asta Cita cita Nomor 7 Tentang Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis Ekonomi Domestik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada visi Kabupaten Tana Tidung **”Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)”**. Misi untuk mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Terpadu Tata Ruang Wilayah.
3. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam.
4. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup.
5. Meningkatkan Kemandirian Desa.
- 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**
7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.

Dari Tujuh Misi yang ditetapkan Kabupaten Tana Tidung untuk mencapai visinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan usaha untuk mencapai misi keenam “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Indikator Pemerintah Daerah yang ingin dicapai adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan predikat Nilai BB di Tahun 2024.

Sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung menetapkan dua (2) tujuan :

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel
2. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.

Dengan dua (2) sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Tingkat Pertumbuhan PAD

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
					TAHUN 2023		
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel		Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Tana Tidung	4 (empat) Tingkatan Opini BPK RI atas Pemeriksaan LKPD: 1. Pernyataan Menolak Memberikan Opini 2. Opini Tidak Wajar 3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	Laporan Hasil Periksa Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan SAP ----- X 100% Jumlah Seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	90%	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Pengelolaan Aset yang Akuntabel	Jumlah Data Aset Daerah Yang Terinventarisasi ----- X 100% Jumlah Seluruh Aset Daerah	90%	Neraca Aset Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) ----- X 100% Pendapatan Transfer	2%	Laporan Pendapatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Tingkat Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Tahun (n) - Jumlah dapatan Tahun (n-1) -----X 100% Jumlah Pendapatan Tahun (n-1)	5%	Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 untuk mencapai tujuan pembangunan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung melaksanakan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kebijakan pengelolaan pelaporan keuangan daerah	Peningkatan Pengelolaan APBD
		Peningkatan manajemen inventarisasi aset daerah	Peningkatan Validasi Pengelolaan Data Aset
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	Identifikasi Sumber-sumber Pendapatan asli daerah yang baru	Peningkatan pendataan pada objek pajak yang baru
		Mengoptimalkan PAD yang ada	Peningkatan penggalan potensi PAD

3.3. Program Dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan menyesuaikan Mapping Nomenklatur Program dan Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang meliputi;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Kabupaten Tana Tidung pada Tahun Anggaran 2025 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 33.000.000.000,00 Adapun Untuk Kegiatan-kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- 2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- 2.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- 2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 2.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 4.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rancangan akhir Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja BPKAD untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan bagi BPKAD untuk menjalankan Program dan kegiatan pada Tahun 2025 untuk mencapai Indikator Sasaran yang sesuai dengan RPJMD yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja/Opini WTP terhadap laporan keuangan Kabupaten Tana Tidung serta untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) tersebut maka BPKAD memiliki beberapa kegiatan dan pengajuan anggaran sebagai berikut :

Tabel Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung

KODE	URUSAN	Perubahan Rencana Tahun 2025								Perkiraan Maju (Tahun 2026)	Keterangan	
		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan							Perubahan Pagu Indikatif (Tahun 2025)		OPD	Sumber Dana
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Lokasi				
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%					KTT	22.085.136.796,00	10.897.746.461,82	BPKAD	APBD
5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase tersedianya Laporan Sakip dan Keuangan	100%	Persentase tersedianya Laporan Sakip dan Keuangan	100%	KTT	19.125.000,00	22.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	KTT	9.625.000,00	11,000,000.00	BPKAD	APBD

5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	KTT	9.500.000,00	11,000,000.00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100%	Persentase terpenuhinya kesejahteraan ASN	100%	KTT	17.566.628.626,00	8.068.763.649,82	BPKAD	APBD
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 Orang	KTT	16.813.208.626,00	6.938.763.649,82	BPKAD	APBD
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	KTT	753.420.000,00	1.130.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase tersedianya ASN yang terdidik dan terlatih	90%	Persentase tersedianya ASN yang terdidik dan terlatih	90%	KTT	211.640.000,00	109.775.500,00	BPKAD	APBD

5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	KTT	45.650.000,00	29.250.000,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Pegawai	KTT	165.990.000,00	80.525.500,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	90%	Persentase terpenuhinya persediaan dan kebutuhan kantor	90%	KTT	2.648.667.060,00	1.383.861.312,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	KTT	4.983.200,00	16.105.100,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	KTT	620.216.570,00	120.000.000,00	BPKAD	APBD

5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	KTT	855.840.500,00	250.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	KTT	88.546.500,00	80.525.500,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	KTT	150.000.000,00	10.629.366,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	KTT	589.056.000,00	906.601.346,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100%	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100%	KTT	1.603.389.000,00	1.081.346.000,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	KTT	11.004.000,00	8.450.000,00	BPKAD	APBD

5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	KTT	822.000.000,00	408.276.000,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	KTT	770.385.000,00	664.620.000,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90%	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	90%	KTT	375.711.400,00	232.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	KTT	294.911.400,00	140.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	KTT	80.800.000,00	92.000.000,00	BPKAD	APBD

5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan dan penetapan APBD yang tepat waktu	100%					KTT	7.346.349.504,00	90.970.661.090,00	BPKAD	APBD
		Persentase atas hasil Monitoring dana kas daerah atas pendapatan, pembiayaan, dan Realisasi Belanja	100%					KTT			BPKAD	APBD
		Persentase laporan keuangan OPD yang sesuai dengan SAP	100%					KTT			BPKAD	APBD
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran daerah	100%	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran daerah	100%	KTT	2.875.594.800,00	930.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	KTT	211.326.000,00	180.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	KTT	209.672.000,00	150.000.000,00	BPKAD	APBD

5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	KTT	252.352.000,00	150.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	KTT	254.660.800,00	150.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	KTT	607.989.000,00	150.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	KTT	1.339.595.000,00	150.000.000,00	BPKAD	APBD

5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Persentase hasil monitoring dana kas daerah	100%	Persentase hasil monitoring dana kas daerah	100%	KTT	1.130.816.300,00	299.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	KTT	231.169.900,00	105.000.000,00	BPKAD	APBD

5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	KTT	642.390.400,00	76.000.000,00	BPKAD	APBD
-----------------	--	--	--	---	------------	---	------------	-----	-----------------------	---------------	-------	------

5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	KTT	257.256.000,00	118.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			Persentase tersedianya laporan dan dokumen akuntansi dan keuangan	100%	Persentase tersedianya laporan dan dokumen akuntansi dan keuangan	100%	KTT	1.339.938.404,00	332.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	377 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	377 Laporan	KTT	921.241.222,00	112.000.000,00	BPKAD	APBD

5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	KTT	209.145.600,00	110.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	KTT	209.551.582,00	110.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Persentase penyerapan Dana Darurat dan Mendesak	82%	Persentase penyerapan Dana Darurat dan Mendesak	82%	KTT	2.000.000.000,00	89.409.661.090,00	BPKAD	APBD

5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	KTT	2.000.000.000,00	409.661.090,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		KTT	0	89.000.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.02.2.04.010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		KTT	0	0	BPKAD	APBD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan dan penyampaian Laporan BMD yang tepat waktu	90%					KTT	1.576.290.400,00	1.031.402.142,00	BPKAD	APBD
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			Persentase BMD yang dikelola	90%	Persentase BMD yang dikelola	90%	KTT	1.576.290.400,00	1.031.402.142,00	BPKAD	APBD
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga			Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	KTT	388.356.200,00	140.774.679,00	BPKAD	APBD
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	KTT	128.705.000,00	63.082.213,00	BPKAD	APBD

5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	25 Dokumen	KTT	130.573.400,00	57.752.889,00	BPKAD	APBD
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	KTT	0	0	BPKAD	APBD
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	34 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	34 Laporan	KTT	56.306.000,00	160.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	10 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	10 Laporan	KTT	120.829.800,00	170.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	KTT	190.994.000,00	118.000.000,00	BPKAD	APBD

5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	KTT	29.282.000,00	118.000.000,00	BPKAD	APBD
-----------------	---	--	--	--	-----------	--	-----------	-----	----------------------	----------------	-------	------

5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	KTT	97.835.000,00	118.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34 Laporan	KTT	55.296.000,00	16.157.808,00	BPKAD	APBD
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	34 Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	34 Laporan	KTT	373.113.000,00	44.634.553,00	BPKAD	APBD
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	KTT	5.000.000,00	25.000.000,00	BPKAD	APBD

5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	90%					KTT	1.992.223.300,00	1.963.000.000,00	BPKAD	APBD
		Jumlah Objek Pajak dan Objek Retribusi Daerah	7%					KTT			BPKAD	APBD
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			Realisasi PAD	Rp. 20.587.060,000	Realisasi PAD	Rp. 20.587.060,000	KTT	1.992.223.300,00	1.963.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	KTT	160.216.000,00	160.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	20 Laporan	KTT	140.220.000,00	230.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	100 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	100 Unit	KTT	86.036.000,00	140.000.000,00	BPKAD	APBD

5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	KTT	206.480.400,00	290,000,000.00	BPKAD	APBD
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	KTT	23.860.000,00	135,000,000.00	BPKAD	APBD
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Daerah	5500 Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Daerah	5500 Objek Pajak	KTT	175.339.000,00	165,000,000.00	BPKAD	APBD
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	500 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	500 Dokumen	KTT	7.230.000,00	128.000.000,00	BPKAD	APBD

5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	116 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	116 Dokumen	KTT	381.260.000,00	135.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	KTT	46.704.000,00	138.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	KTT	431.305.000,00	330.000.000,00	BPKAD	APBD
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	KTT	333.572.900,00	112.000.000,00	BPKAD	APBD
Jumlah									33.000.000.000,00	104.862.809.693,82		

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Tidung maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Tideng Pale, 25 September 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Hj. Evihar, S. Sos
Pembina / IVb
Nip. 19740628 200112 2 002

